

PEMBINAAN AKUNTANSI, PAJAK DAN PEMASARAN PADA KOPERASI (UKM)

Rilla Gantino¹, Ritta Setiyati²

¹²Universitas Esa Unggul
Jl. Arujuna Utara No 9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11510
Rilla.gantino@esaunggul.ac.id

Abstract

The implementation of community service activities aims to provide an understanding of accounting, tax and marketing to SMEs. Implementation of community service for cooperative SMEs through online exposure. Online presentation to explain accounting concepts and the importance of accounting; management concepts such as marketing management, especially marketing strategies, pricing, packaging and online marketing. Exposure of taxes was carried out offline facilitated by the Jakarta Center for Cooperatives, MSMEs and Trade. Furthermore, offline accounting and tax assistance was carried out for 3 months.

Kata kunci : Marketing online, Accounting, Tax

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat bertujuan memberikan pemahaman tentang akuntansi, pajak dan pemasaran kepada pelaku UKM. Pelaksanaan pengabdian masyarakat pada UKM koperasi melalui pemaparan secara daring. Pemaparan daring untuk menjelaskan konsep akuntansi dan pentingnya akuntansi; konsep manajemen seperti manajemen pemasaran terutama strategi pemasaran, penetapan harga, kemasan dan pemasaran daring. Pemaparan pajak dilakukan offline yang difasilitasi oleh Pusdiklat Koperasi, UMKM serta Perdagangan Jakarta Selanjutnya dilakukan pendampingan akuntansi dan pajak offline selama 3 bulan.

Kata kunci : Pemasaran Daring, Akuntansi, Pajak.

Pendahuluan

UKM berkontribusi besar dalam perekonomian di Indonesia. Tiga peran UKM dalam perekonomian di Indonesia adalah:

1. Sarana pemeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil sebab berada di berbagai tempat. UKM menjangkau daerah pelosok sehingga masyarakat tidak perlu ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.
2. Sarana mengentaskan kemiskinan karena menyerap tenaga kerja yang terhitung tinggi.
3. Sarana penambah devisa bagi negara karena pasarnya tidak hanya menjangkau nasional tetapi juga ke luar negeri.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Putri, 2020) diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 1
Sumbangan UKM ke Negara

Uraian	Prosentase (%)
Penyerapan tenaga kerja	89.2 %
Penyediaan lapangan kerja dari total lapangan kerja	99 %
Sumbangan ke PDB Nasional	60.34 %
Sumbangan ke total ekspor	14.17 %
Sumbangan ke total investasi	58.18 %

Sumber : www.kompas.com

Tiga bidang usaha UKM yang menempati urutan teratas dalam perekonomian nasional yaitu perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dan industri pengolahan.

Perkembangan UKM di Indonesia tidak menggembirakan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah wirausahawan di Indonesia meningkat tajam dari 0,24 persen menjadi 1,56 persen dari

jumlah penduduk. Namun demikian, jumlah tersebut masih jauh dari target wirausaha Indonesia yang idealnya minimum 2 persen dari jumlah penduduk. Jumlah wirausaha di Indonesia jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Singapura (7%), Malaysia (5%), dan Thailand (4%). Amerika Serikat dan Jepang bahkan memiliki jumlah pengusaha lebih dari 10 persen dari jumlah populasi penduduk (Nurhaliza, 2020).

Penyebab UKM sulit berkembang antara lain Masalah dalam mengelola keuangan

1. Sumber Daya Manusia belum berkembang
2. Manajemen yang buruk
3. Tidak paham akan pemasaran
4. Tidak membuat perencanaan bisnis dan anggaran
5. Kemampuan teknologi rendah
6. Persepsi Dana investasi dan kredit sulit

Pelaku UKM perlu menerapkan manajemen keuangan, manajemen sumber daya, manajemen pemasaran dan manajemen produksi

Permasalahan lain yang dihadapi oleh UKM selain yang diatas adalah masih mengandalkan pembukuan secara manual bahkan tidak sedikit UKM yang belum melakukan pencatatan secara benar, tidak melakukan program loyalitas pelanggan, serta kurangnya inovasi produk.

Pencatatan yang dimaksudkan adalah dengan menggunakan akuntansi. Pelaku UKM menganggap informasi akuntansi tidak penting, oleh karena itu dalam usahanya belum melakukan praktik akuntansi dengan baik. Selama ini Pelaku UKM belum menyadari pentingnya dari informasi Akuntansi atau sistem keuangan untuk mengetahui sehat tidak nya usaha yang sedang dijalankan tersebut.

Bisnis dan akuntansi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebuah bisnis membutuhkan peran akuntansi untuk mengelola bisnis agar bisa lebih berkembang dan maju. Oleh karena serng diistilahkan *accounting is a business language; it is the language that managers use to communicate the firm's financial and economic information to external parties such as shareholders and creditors. Nobody working in business can afford financial illiteracy* (Weygandt, Jerry J., Kieso, 2013).

Peran akuntansi dalam UKM antara lain :

1. Menjalankan manajemen biaya,
2. Sebagai Pengendalian Manajemen
3. Penghasil Informasi untuk :
 - Alat Analisis
 - Alat Pengontrol dan Pengendali
 - Alat Pengambilan Keputusan
 - Perencanaan Keuangan
 - Dasar menghitung jumlah pajak yang harus dibayar

Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, bahwa perkembangan UKM belum menggembirakan, untuk itu pemerintah terus berupaya mendorong perkembangan UKM. Tujuannya disamping membuka lapangan pekerjaan, berkontribusi dalam ekspor juga bertujuan untuk meningkatkan peran UKM dalam meningkatkan jumlah pajak dari UKM. Hal ini karena kontribusi pajak dari UKM masih rendah. Kontribusi pajak UKM saat ini sebesar Rp6 triliun, masih sangat kecil dibandingkan penerimaan atau pendapatan yang sudah Rp1.300 triliun (Yusuf & Sawitri, 2009) (Prastowo, 2019)(Prastowo, 2019).

Upaya pemerintah agar UKM yang sudah ada turut memenuhi kewajiban pajak adalah dengan menerbitkan tarif pajak baru dengan dasar perhitungan pajaknya adalah besaran omzet pelaku UKM. Tariff pajak ringan untuk UKM yaitu 0.5 % dari omzet bruto yang mulai berlaku 1 Juli 2018.

Penetapan tariff pajak final 0,5% dari omzet jika tidak memiliki catatan pembukuan usaha. Aparat pajak tak peduli usaha untung rugi. Jika tidak menjalankan pembukuan, pajaknya sebesar 0,5% dari omzet UKM. Bahkan insentif keringanan pajak itu akan hilang jika tidak memiliki pembukuan keuangan. Pilihan lain, yakni, pajak 0,5% dari laba kotor jika si UKM memiliki pembukuan usaha. Alhasil, jika usaha merugi, UKM tidak perlu membayar pajak.

Oleh karena itu, Ditjen Pajak mendorong UKM memiliki pembukuan keuangan. UKM diberi masa transisi untuk menyiapkan pembukuan. Untuk wajib pajak (WP) orang pribadi UKM, batas waktu pajak akhirnya adalah enam tahun, sedangkan UKM dengan WP badan batas waktunya tiga tahun.

Metode Pelaksanaan

Dalam menjajaki masalah ini tim pelaksana Memberikan informasi yang lengkap bagaimana PPM dilakukan, mulai dari waktu, lama, tempat, penggunaan alat dan bahan. Cara kerja dan analisa data ditulis secara jelas dan ringkas, bila menggunakan uji statistik cukup dituliskan metodenya saja. Hal tersebut dimaksudkan supaya hal yang sama dapat dilakukan oleh peneliti yang lain.

Salah satu bentuk usaha UKM adalah yang berbadan hukum Koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.

Prinsip koperasi berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yakni:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- Kemandirian Pendidikan perkoperasian.

Perkembangan koperasi juga kurang menggemirakan sebagaimana data yang diperoleh dari Kemen-trian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1
Data Perkembangan Koperasi 2015-2019

Tahun	Koperasi (Unit)		Total Koperasi	Total Aktif	Prosentase Peningkatan DKI	Jumlah Anggota	Volume Usaha DKI	Total Vol Usaha Nasional
	Jumlah	Aktif						
2015	8,024	6,016	212,135	150,223	(5)	882,195	18,149,170	2,121,863
2016	7,599	5,047	208,195	151,170	(24)	1,871,469	4,568,899	266,134,619
2017	5,773	476	152,174	31,360	(50)	18,228,682	12,728,286	137,261,127
2018	2,873	611	126,343	39,011	20	20,049,995	14,825,108	145,862,066
2019*	3,447	657	123,048	35,761	-	1,264,944	16,564,903	154,718,530

* = Sementara

Sumber : <http://www.depkop.go.id/>

Perkembangan koperasi yang kurang baik disebabkan oleh :

1. Administrasi koperasi belum tertata baik
2. Image koperasi sebagai ekonomi kelas dua
3. Management koperasi belum professional
4. Tingkat partisipasi anggota koperasi rendah
5. Kurangnya kerjasama antar usaha koperasi

Beberapa penelitian menghasilkan bahwa pengetahuan tentang akuntansi, sosialisasi peraturan perpajakan, pemahaman atas peraturan perpajakan, penerapan sistem perpajakan modern, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, antara lain dihasilkan oleh Rahmawaty (Rahmawaty & Baridwan, 2014), Nurchamid (Nurchamid & Sutjahyani, 2018), Antari (Antari & Supadmi, 2019), dan Trihatmoko (Trihatmoko & Mubaraq, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, maka kami tertarik melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik pembinaan akuntansi, pajak dan pemasaran pada Koperasi di Jakarta Timur (UKM). Pemilihan koperasi didasarkan pada azas kemudahan akses ke Koperasi. Berdasarkan survey awal diperoleh Koperasi punya keterbatasan waktu dan tim memiliki keterbatasan dana. Serta keterbatasan lain adalah adanya kondisi pandemi sehingga kegiatan terbatas. Koperasi yang dipilih tersebut selanjutnya akan diberi pelatihan akuntansi dan manajemen termasuk pemasaran sekaligus pembinaan dengan model monitoring dan akses diskusi dengan TIM.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di mulai dengan memberikan materi pada tentang pajak bagi koperasi terutama berkaitan dengan tarif baru (0.5% dari omzet). Saat pelaksanaan pemberian materi tersebut difasilitasi oleh PUSDIKLAT Koperasi, UMKM serta Perdagangan DKI secara offline. Materi yang diberikan tidak saja mengenai pajak namun juga tentang pentingnya pencatatan transaksi serta makna omzet bagi

koperasi secara umum dan koperasi angkutan secara khusus.

Kegiatan pengabdian masyarakat disimpulkan dalam tabel berikut :

Tabel 2
Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Nama Pemateri	Materi	Jam	Teknis
1	Dr. Rilla Gantino, SE., Ak., MM	Konsep akuntansi sederhana	15.00-17.30	Virtual Sept dan Oktober
	Ir. Ritta S, MM	Konsep Pemasaran		
2	Dr. Rilla Gantino, SE., Ak., MM	Implementasi dengn gunakan software atau aplikasi	15.00-17.30	Koperasi Angkutan Desember Januari, Feb (laporan)
	Ir. Ritta S, MM	Pemasaran berbasis Web		

Kegiatan pembinaan kemudian dilanjutkan melalui virtual dan offline. Kegiatan pembinaan melalui vitual dibagi menjadi 3 kegiatan utama yaitu pemaparan mengenai 1) konsep pemasaran; marketing mix meliputi dari strategi produk, promosi, harga dan distribusi; pentingnya pemasaran, pemasaran online, 2) akuntansi dan manfaatnya serta 3) Pajak .

Beberapa pertanyaan yang muncul saat pemaparan adalah mengenai cara menghitung pajak berbasis omzet, mendaftarkan sebagai wajib pajak dan cara membuat content Instagram serta penggunaan media pemasaran lainnya. Khusus untuk koperasi angkutan dilanjutkan dengan pendampingan penggunaan software akuntansi untuk membuat laporan keuangan.

Berikut kami informasikan beberapa suasana kegiatan pemaparan secara virtual :



Gambar 1
Virtual Zoom Pemasaran



Gambar 2
Virtual Zoom Akuntansi dan Pajak



Gambar 3
Virtual Zoom Akuntansi dan Pajak

Berikut beberapa foto kegiatan offline sebagai berikut :



Gambar 4
Pemaparan Offline Pajak



Gambar 8
Pemaparan Offline Pajak



Gambar 5
Pemaparan Offline Pajak

Adapun contoh materi pemasaran dan Akuntansi serta pajak adalah sebagai berikut :



Gambar 6
Pemaparan Offline Pajak



Gambar 7
Pemaparan Offline Pajak

Gambar 9
Contoh Materi Pemasaran



Pendampingan penggunaan software dilaksanakan di salah satu koperasi angkutan. Koperasi ini merupakan satu dari 13 koperasi angkutan di DKI. Tugas yang diemban oleh koperasi ini adalah menyelenggarakan administrasi atas jasa angkutan di kota Jakarta.

Kegiatan pendampingan dimulai dengan membuat dan menginput kode rekening, contoh hasilnya adalah sebagai berikut :

KOPERASI MINIBUS
KEBIJAKAN AKUNTANSI

3. CHART OF ACCOUNT (COA)

CHART OF ACCOUNT adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu memasukkan maupun pengeluaran

CHART OF ACCOUNT yang terdapat pada koperasi adalah sebagai berikut:

AKTIVA LANCAR
1100 KAS DAN BANK

- 1110 Kas
- 1111 Kas Kecil
- 1120 Bank BCA
- 1121 Bank DKI

1200 PIUTANG USAHA

- 1210 Piutang Usaha
- 1211 Cadangan THR Pramudi
- 1212 Piutang pada Pengurus
- 1213 Piutang pada Karyawan

1300 PAJAK DIBAYAR DIMUKA

- 1310 PPN - IN
- 1311 PPh ps 22
- 1312 PPh ps 23
- 1313 PPh ps 25

KOPERASI MINIBUS
KEBIJAKAN AKUNTANSI

3. CHART OF ACCOUNT (COA) (Lanjutan)

6000 BEBAN OPERASIONAL (Lanjutan)

- 6120 Beban Fotocopy dan Cetak
- 6121 Beban Konsumsi dan Rapat
- 6122 Beban RAT
- 6123 Beban Lingkungan
- 6124 Beban Pemeliharaan Kantor
- 6125 Beban Inventaris Kantor
- 6126 Beban Sewa Kantor
- 6127 Beban Kartu Pengenal Pengemudi (KPP)
- 6128 Beban Iuran Organda
- 6129 Beban Lain lain

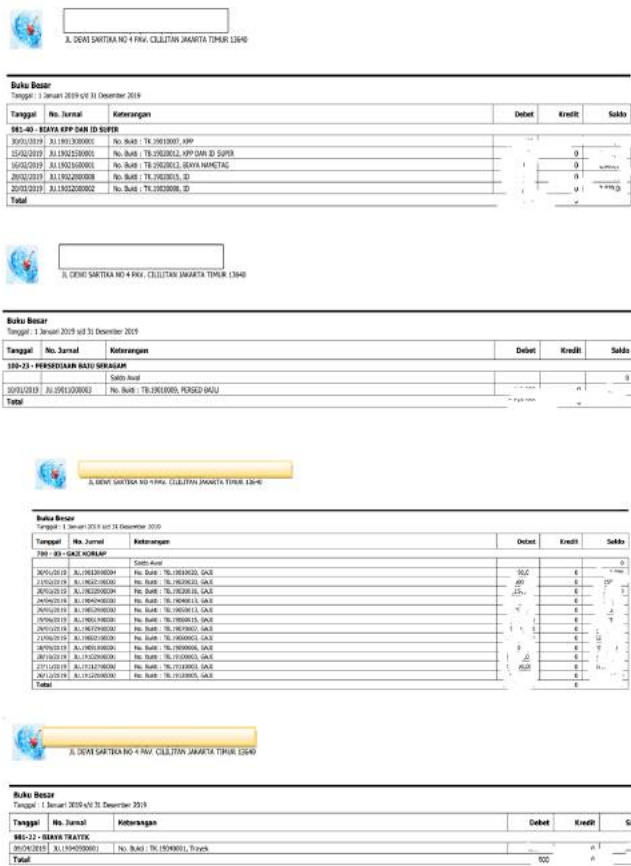
4. LAPORAN KEUANGAN

- a Neraca
- b Laporan Rugi Laba
- c Laporan Cash Flow

Gambar 11.
Contoh Daftar Kode Rekening

Selanjutnya kegiatan pendampingan memberikan contoh entry transaksi dan menghasilkan buku besar. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Gambar 10
Contoh Materi Akuntansi dan Pajak



Gambar 12
Contoh Buku Besar

Beberapa hal yang ditemui di saat pendampingan penggunaan software pada koperasi angkutan ini adalah bahwa :

1. Belum pahamnya fungsi kode rekening
2. Belum paham membdakan pendapatan dan laba
3. Pengadministrasian daftar asset, daftar utang, daftar piutang belum baik
4. Belum memiliki struktur organisasi yang lengkap dengan job desk
5. Belum melakukan pelaporan dan penyetoran pajak

Kesimpulan

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik ini diperoleh kesimpulan :

1. Pelaku UKM perlu didampingi dalam perhitungan harga produk dan jasa yang diberikan
2. Perlu diberikan pemahaman bahwa administrasi perlu dibenahi terutama pembagian kerja dan pengendalian internal

3. Pelaku UKM belum memahami pentingnya kemasan dan higienis produk terutama produk makanan
4. Pelaku UKM perlu diberikan pemahaman mengenai konsep kepuasan pelanggan dan bagaimana membuat pelanggan puas
5. Beberapa pelaku UKM yang memanfaatkan media online belum memahami tentang konsep content yang menarik
6. Pelaku UKM yang belum memanfaatkan media online perlu di berikan pendampingan membuat dan update content.
7. Perlu dilakukan gerakan secara serentak dan bersama-sama untuk membantu UKM dalam melakukan pencatatan dan membantu dalam menghitung serta melaporkan pajak.

Daftar Pustaka

Antari, & Supadmi. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP, 26(1), 221–250.

Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17 Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 41–54. Retrieved from <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Nurhaliza, S. (2020). Ini Target Kontribusi UMKM Terhadap Ekonomi di 2020-2024. *Idxchannel*. Jakarta: Retrieved from <https://www.idxchannel.com/market-news/ini-target-kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-di-2020-2024#:~:text=Sementara di 2024 kontribusi UMKM,dan 2024 ditargetkan mencapai 65%25.>

Prastowo, Y. (2019). Penerimaan Pajak UKM Belum Optimal. *Www.Okezone.Com*. Jakarta. Retrieved from <https://economy.okezone.com/read/2019/01/09/20/2001988/penerimaan-pajak-ukm-belum-optimal>

Putri, A. S. (2020). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik

Indonesia. *Www.Kompas.Com*. Jakarta. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>

- Rahmawaty, S., & Baridwan, Z. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1), 1–10.
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231. Retrieved from <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p05>
- Weygandt, Jerry J., Kieso, D. E. (2013). *Intermediate Accounting IFRS Edition*. John Wiley & Sons, Inc: USA.
- Yusuf, & Sawitri, P. (2009). Modal Intelektual Dan Market Performance perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)*, 3, 49–55.